

MASALAH PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN MINAHASA

Oleh : Arie V. Sendow¹

A. PENDAHULUAN

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian oleh karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di negara-negara yang sedang berkembang titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat dititik beratkan pada sektor agraris. Masalah pertanahan adalah masalah utama yang harus dihadapi oleh negara-negara. Demikian pula halnya dengan Indonesia dimana kurang lebih 80% rakyatnya masih menggantungkan dalam penghasilan pada usaha-usaha di bidang pertanahan.

Bertambahnya penduduk dan adanya kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang sosial ekonomi dan sosial politik. Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan harus pula mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan oleh karena itu harus pula diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan orang banyak.

Dengan demikian meningkatnya laju pembangunan tahun demi tahun baik di sektor industri, pertanian maupun sektor prasarana penunjang yaitu pembuatan jalan-jalan baru sampai ke pelosok gunung menembus daerah-daerah yang dulunya terisolir. Begitu pula pembangunan pasar, rumah mewah maupun rumah sederhana dengan tunjangan kredit BTN, baik yang dibangun oleh swasta maupun Perum Perumnas dan pembukaan hutan untuk lahan transmigrasi, yaitu semua memerlukan tanah yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu pengaturan pertanahan oleh pemerintah. Untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta memperlancar pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Realisasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, pemerintah mengatur pertanahan dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

Dalam kaitan di atas Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa, tanah harus berfungsi sosial artinya harus mengutamakan kepentingan orang banyak, kemudian lebih ditegaskan dalam Pasal 2, seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai dari negara itulah

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

negara menyerahkan tanah negara tersebut pada Departemen, Jawatan atau Daerah Otonom untuk dikelola.

Masalah pengelolaan tanah negara inilah kemudian menimbulkan hak tersendiri yaitu hak pengelolaan tanah negara. Di Kabupaten Minahasa sebagai Daerah Swatantra diberikan penguasaan atas tanah negara, dengan tujuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan suatu hak menurut ketentuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953).

Dengan diberikan hak di atas kenyataan di Kabupaten Minahasa sudah dimanfaatkan tanah tersebut tetapi belum terdaftar kepada Pemerintah (BPN).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pelaksanaan pemberian hak pengelolaan atas tanah negara kepada pihak yang membutuhkan sudah sesuai peraturan yang berlaku?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pemberian hak pengelolaan atas tanah negara di Kabupaten Minahasa?
3. Bagaimana langkah-langkah pemerintah (BPN) untuk penyelesaian masalah pemberian hak pengelolaan atas tanah negara di Kabupaten Minahasa?

C. METODE PENULISAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).²

D. PEMBAHASAN

Tanah dalam pandangan hukum (UUPA) dikemukakan oleh Boedi Harsono sebagai berikut:

".. adalah permukaan bumi itu disebut tanah. Dalam penggunaannya, tanah meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

diatasnya sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut (Pasal 4 ayat (2))”³

Tanah dalam pandangan hukum adat dikemukakan oleh Djaren Saragih sebagai berikut : *Suatu tempat dari mana manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya. Karena itu sampai taraf perkembangan sekarang manusia mempunyai kebutuhan terhadap tanah.*⁴

Selanjutnya pandangan lain yaitu Mu'nim DZ mengemukakan: *Tanah selain memiliki fungsi ekonomi sosial sebagai ajang kesetiakawanan antara sesama manusia juga memiliki fungsi Magis-religius. Oleh karena itu tanah dianggap sakral.* Pandangan ini sangat dominan pada masyarakat tradisional. Meskipun pandangan seperti itu tidak menunjang produktifitas, akan tetapi mampu mencegah kemungkinan terjadinya konflik pertanahan.⁵

Tanah dalam pandangan ilmu ekonomi, dikemukakan oleh salah seorang ekonom terkemuka Djojohadikusumo (dalam Reksohadiprojo dan Karseno) sebagai berikut:

*“Tanah adalah benda milik umum maupun milik pribadi. Tanah merupakan persediaan permanen dan kurang lebih baku. Nilai harganya lebih tergantung pada ketentuan bersama atau ketentuan sosial daripada ketentuan tindakan dan kebiasaan perseorangan”.*⁶

Berdasarkan pengertian di atas, tanah dapat berarti investasi sumber keuntungan ekonomi. Bahkan tanah dapat diterjemahkan dalam pengertian yang abstrak yaitu keringat yang mengucur dari tubuh manusia berserta segenap konsekuensi pandangan hidup yang tumbuh di tanah.⁷

Itulah sebabnya masalah tanah khususnya di daerah sering dipandang sebagai penyebab kontradiksi sosial serta konflik-konflik yang menyertainya. Terlebih lagi jika pemerintah campur tangan dan turut bertindak seirama dengan kelompok dominan. Dalam prespektif itulah Miarsono berpendapat sebagai berikut: ditinjau dari segi sosial ekonomi dan sosio politik masalah pertanahan di Indonesia bisa menjadi sumber pokok keresahan agraris, secara terselubung atau secara terbuka, jika tidak ditangani secara tuntas.

Dalam kehidupan modern, tanah dipandang dari perspektif ekonomi belaka dan dari situlah sebenarnya sengketa bermula. Pandangan serba ekonomis terhadap tanah hanya difungsikan sebagai alat dan sumber

³ Mu'nim DZ, *Tanah dalam Pandangan Teologis*, (Artikel), Kompas, Jakarta, 1993, hal. 3.

⁴ S. Reksohadiprojo dan A.R. Karseno, *Ekonomi Perkotaan*, BPFE,

⁵ Yogyakarta, hal. 11

⁶ P. Mc Auslan, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 22.

⁷ H. Miarsono, *Managemen Perkembangan Perkotaan Terpadu* (artikel), Kompas, Jakarta, 1993, hal. 4

produksi, mengakibatkan terjadilah eksploitasi yang berlebihan yang dapat membahayakan. Demikian uraian tentang pengertian tanah dilihat dari beberapa pandangan, selanjutnya diuraikan pengertian tanah negara.

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah-tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak tertentu yang melekat di atasnya.⁸ Bila negara telah memberikan suatu hak tertentu pada sebidang tanah negara pada seseorang atau badan itu ataupun instansi pemerintah, maka kekuasaan negara atas tanah tersebut dibatasi oleh hak yang melekat di atasnya dan tanah yang bersangkutan disebut sesuai dengan hak yang diberi tadi. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tanah hak milik, tanah hak pakai, tanah hak guna usaha, tanah hak guna bangunan, tanah hak pengelolaan, dan lain-lain.

1. Pelaksanaan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara

Seiring dengan gerak jalan kehidupan bernegara dan tuntutan kebutuhan hukum dalam lapangan hukum agraria khususnya berkaitan dengan semakin meningkatnya kebutuhan tanah baik untuk kepentingan jalannya pemerintahan maupun untuk kepentingan pembangunan, maka oleh pemerintah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyesaian serta Pendaftarannya. Sebagai tindak lanjut dikeluarkan peraturan tersebut diatas telah pula diterbitkan berbagai petunjuk pelaksanaannya baik dalam bentuk Keputusan Menteri maupun Surat Menteri; diantaranya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana.

Dan surat perjanjian kerjasama Perum Perumnas dengan Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 April 1995 No. Pihak Pertama : DIRUT 133/10IV/1995; Pihak Kedua SPK.16/IV/95. tentang Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Perum Perumnas dan Surat Edaran Kepada Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Mei 1995 Nomor 560.I-DI Perihal Biaya Pembuatan Peta Situasi Kapling, Persertifikatan Hak Pengelolaan Tanah Perum Perumnas. Permohonan hak diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya setempat. Blangko permohonan hak tersedia di masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Permohonan hak dapat dilakukan/diajukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Biro Umum/Biro Hukum, atau Kepala Unit instansinya di daerah yang bertindak untuk dan atas nama instansi induknya di pusat, dengan surat kuasa. Permohonan diajukan untuk mendapatkan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan.

⁸ Marlini Manan, *Hak Pengelolaan Tanah Negara*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988, hal. 37.

Dalam permohonan hak tersebut dilampirkan surat tanda bukti perolehan tanah seperti jual-beli, hibah, berita acara pembebasan tanah, surat pelepasan hak, dan lain-lain. Jika tanda bukti perolehan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali dibuat surat pernyataan dari instansi induk.⁹ Setelah berkas permohonan hak diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat kemudian dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dan pengukuran ditempat/letak tanah serta pemeriksaan fisik lapangan. Penelitian dan pengukuran lapangan dilakukan dengan mengikutsertakan wakil instansi yang bersangkutan untuk menunjukkan batas-batas tanahnya.

Sepanjang instansi yang bersangkutan telah memiliki dokumen yang lengkap yaitu bukti-bukti perolehan yang berasal dari pembebasan tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1985 dan tidak ada perubahan pada gambar situasinya yang sudah ada, maka apabila menurut pertimbangan Kepala kantor Pertanahan masih memenuhi syarat teknis, tidak diperlukan lagi pemeriksaan tanah oleh Panitia pembebasan tanah sebagai alas haknya. Untuk permohonan hak oleh instansi pemerintah atas tanah yang belum pernah terdaftar, pemeriksaan fisik di lapangan tidak perlu dilakukan oleh panitia pemeriksaan atas tanah A tetapi cukup hanya oleh Tim Penelitian Tanah yang terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua Tim atau Kepala Seksi Hak-hak atas tanah yang ditunjuk;
- b. Keanggotaan Tim terdiri dari unsur-unsur seksi teknis pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
- c. Sekretariat Tim Sub Seksi Pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
- d. Hasil penelitian tim dituangkan dalam suatu berita acara yang memuat segala aspek di dalam pertimbangan permohonan hak atas tanah.
- e. Bilamana atas yang dimohon oleh instansi pemerintah berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar tidak diperlukan pembuatan berita acara cukup dengan “konstatering raport dari Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Terhadap permohonan hak atas tanah-tanah instansi pemerintah tidak dipersyaratkan lagi adanya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT). Permohonan hak tersebut diproses dengan disertai berkas kelengkapan berupa:

- a. Permohonan hak instansi yang bersangkutan.
- b. Berita acara Tim penelitian tanah/konstatering raport.
- c. Gambar situasi tanah yang dimohon.

⁹ Badan Pertanahan Nasional, *Op-cit*, hal. 5-6.

- d. Fotokopi bukti perolehan penguasaan tanah dan atau surat pernyataan instansi yang bersangkutan.

Dengan daftar pengantar permohonan hak tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan tembusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan instansi pemohon. Dalam penyelesaian sertifikat tanah-tanah instansi, jangka waktu penyelesaian sebagai berikut: untuk mencapai hasil yang maksimal atas penyelesaian tanah-tanah instansi pemerintah yang telah memenuhi syarat dan tidak ada permasalahan, proses permohonan hak dan penerbitan sertifikatnya ditetapkan jangka waktu adalah:

- a. Proses permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya selama 2 bulan
- b. Proses penertiban surat keputusan pemberian hak di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi selama 1 bulan
- c. Proses pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya selama 15 hari
- d. Proses penerbitan surat keputusan pemberian hak di Badan Pertanahan Nasional sepanjang berkasnya diterima selama 1 bulan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi pemberian hak pengelolaan atas tanah negara di Kabupaten Minahasa di bawah ini:

No.	Pemohon	Letak Kec/Desa	Luas M ²	Kegunaan	Ket.
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa	Airmadidi - Sukur	4780	Pasar	
2.	- sda -	Tumpaan - Tumpaan I	2360	Pasar	
3.	- sda -	Kauditan - Kema I	2160	Pasar	
4.	- sda -	Ratahan Tosuraya Tolomukan	1945 1201	Pasar	
5.	- sda -	Tombariri - Borgo	1650	Pasar	Batal
6.	- sda -	Remboken - Talikuran	908	Pasar	
7.	- sda -	Belang - Borgo	1285	Pasar	
8.	- sda -	Tombatu - Ranoketang - Betelan - Tombatu	1345 4375 2440	Pasar Pasar Pasar	

		- Mundung	1285	Pasar	
9.	- sda -	Langowan - Karumenga - Walaure	1510 14600	Pasar Pasar	Batal
10.	- sda -	Tereran - Lansot	5500	Pasar	
11.	Perumas	Kawangkoan	53305	Perum	
12.	- sda -	Kawangkoan	119477	Perum	
13.	- sda -	Kawangkoan	102680	Perum	
14.	- sda -	Kembuan	83702	Perum	

Sumber : Data BPN Kabupaten Minahasa Daerah Tingkat II Minahasa 1999-2000

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tanah negara yang mendapat hak pengelolaan yaitu pasar dan Perum Perumnas. Untuk Pasal 47344 M² akan tetapi Desa Borgo Kecamatan Tombariri dan Desa Waleure Kecamatan Langowan yang telah mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa dinyatakan batal karena masih bermasalah. Jadi jumlah yang sudah terdaftar $47344 \text{ M}^2 - 16250 = 31094 \text{ M}^2$. dari jumlah ini yang sudah mendapat sertifikat adalah Desa Sukur Kecamatan Airmadidi dan Desa Tumpaan I Kecamatan Tumpaan yang sisanya dalam proses. Sedangkan untuk Perum Perumnas yang terdaftar berjumlah 359164 M² dari jumlah ini semua telah diproses dan mendapat sertifikat.

2. Kendala-Kendala Dalam Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara

Setiap pemberian hak atas tanah bukanlah sekali-kali tanpa menemui rintangan atau kendala-kendala oleh karena itu dengan upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan sebagai bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dalam menegakan amanat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dalam proses pemberian hak pengelolaan ada beberapa kendala-kendala yang dijumpai. Dalam proses permohonan kendala utama yang dihadapi adalah mengenai bukti/surat-surat bukti yang menjadi dasar hukum penguasaan/perolehan tanah dari instansi pemohon hak pengelolaan atas tanah yang dimohon.

Dalam kaitan di atas dengan sendirinya instansi pemerintah/badan hukum (BUMN/D) milik pemerintah mengenai subyek hak pengelolaan dibebani ketentuan dan tanggung jawab penuh untuk membuktikan kebenaran/keabsahan tentang penguasaannya atas tanah negara. Baik sebelum maupun sesudah diterbitkan sertifikat hak pengelolaan dalam hal ini pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) hanya meletakkan hubungan hukum antara subyek hak pengelolaan dengan tanahnya. Kurang jelasnya tanda-tanda batas bidang tanah negara yang domohonkan hak pengelolaan dapat menjadi hambatan dalam mempercepat proses pemberian haknya ataupun

menimbulkan sengketa batas bidang tanah hak pengelolaan dengan hak lain. Dalam kaitan di atas apabila hak pengelolaan atas tanah negara nantinya akan ditindaklanjuti dengan pemberian hak lain kepada pihak ketiga, hal ini akan menjadi kasus tanah-tanah Perum Perumnas yang perolehan/penguasaannya berasal dari pembebasan tanah dengan ganti rugi kepada para pemilik.

Baik statusnya sebagai tanah milik adat/pasini dan atau tanah hak milik/hak guna bangunan yang mana pada saat pembebasan tanahnya selesai tidak segera dilakukan langsung langkah pengaman atas bidang tanahnya dengan jalan memasang tanda batas pada setiap sudut bidang tanah secara permanen. Ketentuan dari Pasal 2 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1/1977 dapat menimbulkan masalah hukum dalam hal pendaftaran hak lain atas tanah hak pengelolaan disatu pihak dan eksistensi dari hak pengelolaan itu sendiri. Pasal 2 berbunyi bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membangun wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga Pasal 5 berbunyi hubungan hukum dengan lembaga instansi atau badan hukum milik pemerintah pemegang hak pengelolaan, yang didirikan atau ditunjuk untuk menyelenggarakan penyediaan tanah yang termasuk dalam gambaran pemukiman dalam bentuk perusahaan.

Dengan dimulainya era otonomi daerah dimana urusan dibidang pertanahan yang dahulu menjadi kewenangan pemerintah (pemerintah pusat), maka sekarang ini perlu dipikirkan aturan mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara pemberian hak pengelolaan yang sejiwa dengan semangat desentralisasi termasuk di bidang pertanahan yang akan menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yo UU No. 25/2000 dimana urusan pertanahan menjadi kewenangan pemerintah daerah (Kabupaten/Kotamadya).

3. Langkah-Langkah Pemerintah (Bpn) Dalam Penyelesaian Masalah Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara

Pemerintah dalam hal ini badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang berkompeten menyelenggarakan urusan/kewenangan di bidang pertanahan telah mengeluarkan berbagai aturan. Menyangkut penyelesaian pemberian hak pengelolaan badan Paertanahan yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 26/1988 diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam keputusan tersebut diatas yang menjadi dasar pelaksanaan tugas adalah semua peraturan yang telah ada di bidang pertanahan termasuk peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1977. Untuk itu langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pemberian hak pengelolaan atas tanah negara dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan proses psikologi yang timbul setelah adanya rangsangan dari luar atau lingkungan yang dipengaruhi oleh pengalaman. Faktor pengalaman dan sosialisasi akan memberikan suatu pemahaman dan

struktur terhadap hukum yang diamati. Intansi pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan bidang tanahnya dari pendudukan pihak lain khususnya terhadap tanah-tanah yang masih kosong atau belum dibangun, dengan cara antara lain:

- a. Memasang pagar atau tanda batas permanen;
- b. Membuat pos jaga;
- c. Membuat papan nama;
- d. Tidak mengizinkan pemakaian/penggarapan oleh pihak lain tanpa ijin yang berwenang; dan
- e. mengupayakan segera pelaksanaan pembangunan.

Demikian uraian tentang langkah-langkah pemerintah dalam penyelesaian masalah pemberian hak pengelolaan atas tanah negara.

E. PENUTUP

Dalam pemberian hak pengelolaan atas tanah negara di Kabupaten Minahasa sudah sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi masih banyak instansi yang memiliki tanah negara belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa untuk memiliki hak pengelolaan. Dibandingkan dengan Perum Perumnas dalam pemanfaatan tanah negara semua telah diproses dan mendapat sertifikat.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak pengelolaan atas tanah negara adalah sebagai berikut :

- 1) bukti pengelolaan/penguasaan tanah;
- 2) tanda-tanda batas bidang tanah yang tidak jelas;
- 3) hubungan hukum dengan hak pengelolaan dengan tanahnya.
- 4) Koordinasi antar instansi belum berjalan dengan apa yang diharapkan

Langkah-langkah pemerintah (BPN) dalam penyelesaian masalah pemberian hak pengelolaan atas tanah negara adalah :

- 1) Ditingkatkan kesadaran hukum instansi pemilik tanah negara untuk mendaftarkan tanah negara, dan
- 2) Melakukan indentifikasi masalah pemberian hak pengelolaan tanah negara.

DAFTAR PUSATAKA

Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah*, Jakarta, 1992.

Hasono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah Penyusunannya, Djambatan, Jakarta, 1975.

-----, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1988.

Manan Marlini, *Hak Pengelolaan Tanah Negara*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988.

- Miarsono H, *Menegemen Perkembangan Perkotaan Terpadu* (Artikel), Kompas, Jakarta, 1993.
- Mc Usan P, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Perlindunganb Rakyat Jelata*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Reksohadiprojo, S, dan A.R. Karseno, *Ekonomi Perkotaan*, BPFE, Yogyakarta.
- Saragih Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Salindeho Jhon, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Grafika, Jakarta, 1988.